

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR MELALUI DANA DESA
DI DESA BILUNGALA KECAMATAN
BONEPANTAI KABUPATEN
BONE BOLANGO**

Oleh:

**KINTAN NURAINI HADIA
NIM: S.21.17.016**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI DANA DESA DI DESA BILUNGALA KECAMATAN BONEPANTAI KABUPATEN BONE BOLANGO

Oleh:

KINTAN NURAINI HADIA

NIM: S2117016

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Ichsan Gorontalo

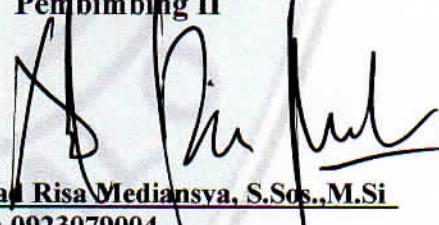
Telah disetujui dan siapdi seminarkan
Gorontalo.....,.....2021

Pembimbing I



Dr. Bala Bakri, S.I.P.,SE.,S.Psi.,MM
NIDN: 002057502

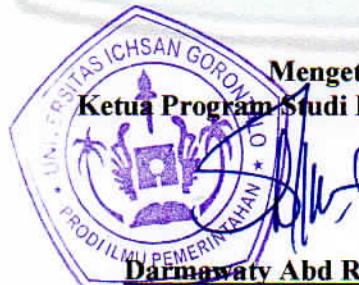
Pembimbing II



Achmad Risa Mediansya, S.Sos.,M.Si
NIDN: 0923079004

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Darmawaty Abd Razak, S.I.P.,M.A.P

NIDN:0924076701

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR MELALUI DANA DESA
DI DESA BILUNGALA KECAMATAN
BONEPANTAI KABUPATEN
BONE BOLANGO

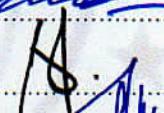
OLEH :

KINTAN NURAINI HADIA
NIM: S2117016

SKRIPSI

Telah Dipertahankan dihadapan Penguji
Pada Tanggal 21 Maret 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Komisi Penguji :

1. Dr. Bala Bakri, S.IP.,SE.,S.Psi.,MM : 
2. Achmad Risa Mediansyah, S.Sos.,M.Si : 
3. Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP : 
4. Sandi Prahara, S.T.,M.Si : 
5. Deliana Vita Sari Djakaria, S.IP.,M.IP : 

Mengetahui :



Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN:0913078602



Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Darmawaty Abd Razak, S.IP., M.AP
NIDN:0924076701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karna karya tulis, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 26 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



KINTAN NURAINI HADIA

NIM : S2117016

ABSTRACT

KINTAN NURAINI HADIA. S2117016. IMPLEMENTATION OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROGRAM THROUGH VILLAGE FUND IN BILUNGALA VILLAGE, BONE PANTAI SUBDISTRICT, BONEBOLANGO DISTRICT

This study aims at finding out 1) the implementation of infrastructure development programs through village funds in Bilungala Village, Bone Pantai Subdistrict, Bonebolango District, and 2) the supporting and inhibiting factors for implementing infrastructure development programs through village funds in Bilungala Village, Bone Pantai Subdistrict, Bonebolango District. This study employs a qualitative method with data collection through observation, interviews, and documentation. The data analysis technique applies data collection, data presentation, and conclusions. The results of this study indicate that: 1) the development of infrastructure programs in Bilungala Village is carried out in two areas of development, namely: (a) infrastructure development in the economic sector, which includes village roads, pivot roads, and environmental sanitation. The objectives and targets of this infrastructure development are to support the community's activities in the economy, and (b) the social sector infrastructure development in Bilungala Village has not been implemented due to the limited available budget. 2) the supporting factors in the infrastructure development implementation are the availability of a budget for development, community participation, and an active role in village development. Meanwhile, the inhibiting factors are the lack of public awareness of development in the village, the lack of funds owned by the village in financing development, and the low professionalism of the work of village officials.

Keywords: government efforts, community participation, village development

ABSTRAK

KINTAN NURAINI HADIA. S2117016. IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI DANA DESA DI DESA BILUNGALA KECAMATAN BONE PANTAI KABUPATEN BONEBOLANGO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) bagaimana implementasi program pembangunan infrastruktur melalui dana desa di Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bonebolango, dan 2) untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi program pembangunan infrastruktur melalui dana desa di Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bonebolango. Metode yang digunakan metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 1) pelaksanaan pembangunan program infrastruktur di Desa Bilungala dilaksanakan dengan dua bidang pembangunan yaitu; a) pembangunan infrastruktur bidang ekonomi, pembangunan infrastruktur ekonomi ini diantaranya jalan desa, jalan poros, dan sanitasi lingkungan. Pembangunan infrastruktur ini tujuan dan sasarannya untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat, b) pembangunan infrastruktur bidang sosial di Desa Bilungala belum terlaksana dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia., dan 2) yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur melalui dana desa yaitu; a) faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yakni tersedianya anggaran untuk pembangunan, partisipasi masyarakat, dan peran aktif dalam pembangunan desa, b) faktor penghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur yakni kurang kepedulian masyarakat terhadap pembangunan di desa, kurang dana yang dimiliki desa dalam pembiayaan pembangunan, dan rendahnya profesionalitas kerja aparat desa.

Kata Kunci : Upaya Pemerintah, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa

HALAMAN PERSEMBAHAN



KARYA SEDERHANAINI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA :

- 1. Allah SWT yang memberikan anugerah dan kasih sayang selama hidup.**
- 2. Keluarga tersayang yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga saya mendapatkan gelar sarjana**
- 3. Masyarakat Gorontalo yang telah menjadi bagian penting dalam mempengaruhi baik sikap maupun tindakan saya**
- 4. Almamater dan civitas akademik di ICHSAN GORONTALO**

Halamam motto

“Lembaga Pendidikan yang didalamnya dijalankan oleh sistem Neoliberalisme akan berubah menjadi pasar central dimana semua barang bisa di obral”

Tidak pantas di sebut Guru jika tugasnya
hanya memberi

“Pendidikan bukanlah bagaimana cara orang menjadi pintar, melainkan bagaimana membuat orang menjadi sadar”

“Sulit menjadi cerdas, amat sulit menjadi sukses, tapi kesulitan yang sesungguhnya adalah ‘melawan lupa’. Lupa akan siapa kita, bagaimana kita dan untuk apa kita”

(KINTAN NURAINI HADIA)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang sederhana ini, yang berjudul “Implementasi Program Pembangunan Infrastruktruk Melalui Dana Desa di Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bonebolango” dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam usulan skripsi ini adalah hasil karya yang masih sangat sederhana. Namun, penulis persembahkan kehadapan para pembaca yang budiman, semoga setelah menelaah isinya berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif guna penyempurnaan usulan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Kisman Hadia dan Ibu Tanti Putu atas segala do'a dan dukungan morilnya
2. Ibu Dra. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Abdul Gafar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Dr. Arman S.sos, M.Si., Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo

5. Ibu Darmawaty Abd. Razak S.IP., M.AP., Sebagai ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Dr. Bala Bakri, S.IP.,S.E.Psi.,MM., Selaku Dosen Pembimbing I
7. Bapak Achmad Risa Mediansyah, S.Sos.,M.Si Selaku Dosen Pembimbing II
8. Ibu Sandy Prahara ST., M.SI Selaku Pembimbing Akademik
9. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
10. Teman teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017

Semoga bantuan dan dorongan yang calon peneliti terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik.

Gorontalo, september 2020

Kintan Nuraini Hadia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.

LEMBAR PERSETUJUAN.....	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur	7
2.1.1 Pengertian Implementasi.....	7
2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi.....	8
2.1.3 Pengertian Program.....	9
2.1.4 Pengertian Pembangunan	10
2.1.5 Pengertian Infrastruktur	12
2.1.6 Pembangunan Infrastruktur.....	13
2.1.7 Manfaat Pembangunan Infrastruktur.....	14

2.1.8 Kebijakan Program Nasional Pembangunan	15
Infrastruktur Pedesaan.....	15
2.2 Konsep Dana Desa	19
2.2.1 Pengertian Dana Desa	19
2.2.2 Pemanfaatan Dana Desa.....	19
2.2.3 Landasan Hukum Penggunaan Dana Desa	22
2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Infrastruktur	24
2.4 Kerangka Fikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.3 Fokus Penelitian.....	33
3.4 Sumber Data.....	33
3.5 Informan Penelitian.....	34
3.6 Pengumpulan Data	35
3.7 Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Hasil Penelitian.....	38
4.2 Pembahasan.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk meningkatkan proses pembangunan nasional agar supaya kecepatan pembangunan infrastruktur daerah dan desa semakin meningkat setara serta selaras. Prasarana merupakan peralihan peningkatan ekonomi, sebagai pengendali dan penentu arah pembangunan nasional juga berdampak pada pertumbuhan kesejahteraan hidup manusia.

Pembangunan merupakan bagian dari tahapan perkembangan pembangunan daerah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh agar supaya pelaksanaan program dana Desa ini pemerintah mengharapkan masyarakat ikut berpartisipasi, saling mengetahui satu sama lain, bekerja sama ke arah perbaikan yang lebih baik dari sebelumnya, dan masyarakat ikut berpartisipasi langsung dalam pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur diawali dari wilayah desa sampai daerah kota. Pemerintah melucurkan anggaran desa guna menjalankan pembangunan desa dimulai dari kegiatan yang produktif. Pemanfaatan keuangan desa diprioritaskan guna membangun prasarana seperti irigasi, jalan, jembatan dan rabat beton. Pemanfaatan dana desa secara optimal untuk kegiatan pembangunan diharapkan bisa meningkatkan perekonomian desa yang mengikuti jalannya perekonomian perkotaan dengan terlaksananya pembangunan infrastruktur, desa sanggup dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan

desa merupakan salah satu petunjuk menggali kemampuan dan ide pembangunan infrastruktur desa yang mengutamakan pada partisipasi masyarakat pada semua proses pembangunan agar sesuai dengan sasaran. Perencanaan sebagai kegiatan analisis mulai dari kebutuhan masyarakat hingga penentuan program pembangunan.

Proses pembangunan yang dilakukan antara daerah desa, dan kota, yang mengikutsertakan proses perpindahan yang terjadi antara kedua lokasi tersebut, sehingga pemerintah Indonesia penting memberikan kebijakan dalam melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur agar supaya tidak terjadi ketidaksesuaian sosial antara masyarakat kota dan desa, hal ini juga dapat membangun Indonesia lebih baik melalui peningkatan perekonomian yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung (Mudrajad Kuncoro, 2010: 10).

Pelaksanaa pembangunan disuatu daerah harus memperhatikan prinsip perencanaan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) nomor 54 Tahun 2010 meliputi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilaksanakan pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan wewenang masing-masing, pembauran rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilakukan sesuai dengan keadaan, kemampuan yang dimiliki masing-masing daerah berdasarkan dinamika pertumbuhan daerah. (Ernady, 2015: 17).

Pembangunan sarana prasarana merupakan usaha berkelanjutan dalam mengembangkan serta mempercepat pemerataan pembangunan pada tahap kedua pembangunan yang direncanakan secara sistematis dilakukan oleh semua unsur

bangsa melalui pemanfaatan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel sehingga terwujudlah peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Dana desa merupakan anggaran yang berasal dari APBN yang disediakan untuk desa, yang dikirim melalui Anggaran Belanja Daerah Kabupaten. Dana ini dipakai untuk memfinansir penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa dialokasikan dari APBN berdasarkan pasal 72 ayat 1 huruf b Undang-Undang no.6 tahun 2014 tentang desa.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah salah satu aspeknya adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu program pemerintah dibidang keuangan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu serta melaksanakan misi mewujudkan suatu strategi melalui bermacam-macam kegiatan. Melalui dana desa, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintah dan sosial masyarakat desa secara otonom. Dana desa adalah dana yang dikucurkan untuk desa dari pusat guna pembangunan di desa supaya terbentuk desa yang lebih baik, maju, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa karena dana desa bertujuan memberikan sarana prasarana sampai masyarakat desa dapat terbantuan dalam meningkatkan perekonomiannya. Dengan adanya dana desa, kemiskinan di desa serta keterbatasan ekonomi sedikit dapat teratasi dengan adanya prasarana yang telah dibangun dengan anggaran dana desa sehingga tercipta desa yang penuh karya kreatifitas dan inovasi dari desa untuk semua warga masyarakat Indonesia.

Berdasarkan penelitian peneliti, menunjukkan implementasi pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di desa Bilungala kecamatan Bonepantai kabupaten Bonebolango kurang optimal, dari enam program pembangunan seperti pembangunan jalan desa, jalan poros, sanitasi, drainase, rabat beton, dan poskesdes, hanya tiga program yang terlaksana secara optimal yaitu pembuatan jalan desa, jalan poros, sanitasi, sedangkan pembangunan drainase, rabat beton, dan poskesdes kurang optimal dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa dan ketersediaan anggaran keuangan desa dalam pembiayaan pembangunan yang ada di Desa Bilungala.

Sekarang ini sudah terlaksana proses pembangunan di dalam desa. Namun belum terlaksana secara optimal. Pembangunan dilaksanakan untuk menjamin dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semua aspek kehidupan masyarakat dengan adanya pembangunan infrastruktur mengalami bermacam pertumbuhan dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Kesemua itu merupakan bentuk kemauan masyarakat untuk menuju kearah yang lebih baik. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur pula merupakan kebutuhan utama untuk masyarakat disuatu tempat dalam meningkatkan pembangunan berbagai bidang yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Selain itu, dalam pembangunan infrastruktur berdampak pada mutu pekerjaan yang dilakukan, keberlanjutan operasional dan pengurusan prasarana tersebut, kesanggupan masyarakat dalam membangun kerja sama dengan pihak tertentu, dan peningkatan kualitas masyarakat agar mampu secara mandiri menyediakan kegiatan masyarakat diwilayahnya.

Selain itu juga, di karenakan sekarang ini lagi masa pandemi covid 19 maka dari itu banyak dana desa yang di pending dan di geser menjadi dana covid seperti dana pembangunan jamban, penanggulangan bencana dan dana pembelian lampu tenaga surya, jadi dana untuk pembangunan tersebut di pending dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 saja.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Melalui Dana Desa di Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bonebolango”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi program pembangunan infrastruktur melalui dana desa di Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bonebolango?
- 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi program pembangunan infrastruktur melalui dana desa di Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bonebolango?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini agar supaya mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan implementasi program pembangunan infrastruktur dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembangunan prasarana melalui dana desa,

serta sebagai dasar penyusunan proposal skripsi untuk memenuhi persyaratan menempuh ujian skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Universitas Ichsan Gorontalo.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi program pembangunan infrastruktur melalui dana desa di desa Bilungala kecamatan Bonepantai kabupaten Bonebolango
- 2) Untuk mengetahui faktor yang pendukung dan penghambat implementasi program pembangunan infrastruktur melalui dana desa di desa Bilungala kecamatan Bonepantai kabupaten Bonebolango

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang pelaksanaan pembangunan infrastruktur serta untuk mengetahui tingkat capaian pembangunan infrastruktur desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur

2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan kegiatan yang nampak sesudah keberadaan pemberian petunjuk dilakukan berdasarkan aturan suatu program yang berkaitan dengan usaha mengelola. Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2006:124) mendefinisikan “ implementasi sebagai langkah-langkah yang dilakukan oleh individu, pejabat - pejabat, kelompok - kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan pada keputusan kebijakan”. Langkah-langkah yang dimaksud meliputi upaya dalam merubah ketentuan berubah langkah-langkah operasional pada jangka waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan upaya-upaya untuk meraih inovasi besar dan kecil yang sudah ditentukan oleh program.

Implementasi suatu program merupakan suatu yang tergabung dalam satu kesatuan, disebabkan berbagai macam faktor yang saling mempengaruhi dalam suatu sistem yang tidak terlepas dari faktor lingkungan yang canggung berubah-ubah. Donald P. Warwick dalam bukunya Syukur Abdullah, mengatakan bahwa dalam tahap implementasi program terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu faktor pendorong dan penghambat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan implementasi merupakan suatu proses dilakukannya suatu program, baik dilingkungan pemerintah, masyarakat, organisasi atau sekolah yang hasilnya bias dilihat dari pencapaian target dari

tujuan awal, sehingga dalam implementasi ini sangat memungkinkan banyak masalah bersifat teknis sebagai usaha untuk mencapai tujuan tersebut.

2.1.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup: (Merile S. Grindle dalam bukunya Budi Winarno, 2012: 21)

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sebagai contoh masyarakat di bawah *slumareas* lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan dari pada menerima program kredit sepeda motor
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:
 - a) Seberapa besar kepuasan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
 - b) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa
 - c) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

Van Meter dan Van Horn menjelaskan tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. (Van Meter dan Van Horn dalam bukunya Budi Winarno, 2012: 179). Van Meter dan Van Horn (dalam buku Winarno), menggolongkan

kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal yaitu: ((Van Meter dan Van Horn *dalam bukunya* Budi Winarno, 2012: 179)

- 1) Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif dari pada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada terbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan.
- 2) Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan.

2.1.3 Pengertian Program

Program merupakan pernyataan yang mengandung kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling ketergantungan dan saling berkaitan, untuk mencapai sasaran yang sama. Kadangkala suatu program menyangkut keseluruhan kegiatan yang berada di bawah unit kerja yang sama, untuk sasaran yang saling ketergantungan dan saling melengkapi, yang semuanya harus

dilakukan secara berurutan. (Muhammin Suti'ah dan Sugeng Listyo Prabowo, 2009:349).

Program sering berkaitan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan. Desain berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata *decine*. Jadi desain dalam prespektif pembelajaran adalah rencana pembelajaran (Mudasir, 2012:1).

2.1.4 Pengertian Pembangunan

Menurut Syamsi Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri (2006:15) pembangunan adalah proses inovasi sistem yang terencana kearah perbaikan yang tinjauannya pada kemajuan sosial ekonomi. Konsep pembangunan merupakan kunci pembuka bagi definisi baru tentang hakikat fungsi administrasi pada setiap negara yang bersifat dinamis. Pembangunan akan dapat terlaksana dengan baik, apabila disertai dengan pengadministrasian yang baik.

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang berkelanjutan secara terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (2010) pembangunan merupakan serangkaian upaya untuk menciptakan perkembangan dan inovasi yang terencana dengan sadar, yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas untuk pembinaan bangsa.

Pembangunan dibagi menjadi pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang dapat dilihat oleh mata. (Kuncoro 2010:20). Pembangunan fisik meliputi infrastruktur bangunan, dan fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik merupakan jenis pembangunan yang

tercipta oleh dukungan masyarakat disuatu tempat dan memiliki tempo yang lama. Contoh dari pembangunan non fisik adalah peningkatan ekonomi masyarakat desa, dan peningkatan kesehatan masyarakat. (Wresniwiwo, 2012). Sedangkan menurut Saul M. Katz dalam Yuwono (2001 :47) pembangunan merupakan inovasi sosial yang berasal dari suatu kondisi tertentu yang dianggap lebih bernilai. Oleh karena itu, agar mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan itu, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah. Pembangunan yang telah direncanakan selama ini bisa terlaksana sesuai sasaran yang telah ditentukan bersama-sama, dan apabila ada tanggapan yang positif dari masyarakat, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Gran dalam Yumono (2001 : 54). “Bawa peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama dari pembangunan dimana pembangunan masyarakat yang menentukan tujuan dan sumber pengawasan serta mengarah pada proses pelaksanaan pembangunan. Contoh dari pembangunan fisik adalah :

- 1) Prasarana penghubung yaitu jalan, jembatan, dan lain-lain.
- 2) Prasarana jual beli yaitu gedung, dan pasar.
- 3) Prasarana sosial yaitu bangunan sekolah, rumah - rumah ibadah, dan Puskesmas.

Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak berwujud tetapi bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini sering disebut dengan pembangunan masyarakat, yang berupa:

- 1) Pembangunan bidang keagamaan
- 2) Pembangunan kesehatan dan keluarga berencana

- 3) Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban
- 4) Pelayanan urusan masyarakat berupa pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), penerbitan Kartu Keluarga (KK), pembuatan akta kelahiran.
- 5) Pembuatan surat keterangan domisili

2.1.5 Pengertian Infrastruktur

Infrastruktur adalah suatu sistem fasilitas publik, yang mendasar ditujukan kepada masyarakat / khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat. (Nurcholis, 2011: 37).

Secara umum infrastruktur adalah istilah yang berhubungan maknanya dengan struktur di bawah structural. Pengertian ini berimplikasi pada perbedaan lapisan dari struktur yang ada, ibaratnya memberikan pelayanan. Dalam dunia fisik, terminology kadangkala mengarah kepada berbagai keperluan banyak orang, berupa air, listrik, gas, saluran air, dan layanan jaringan telepon. Dalam infrastruktur mempunyai beberapa karakteristik tertentu termasuk:

- 1) dipakai bersama-sama oleh pengguna yang semakin luas, dibandingkan dengan struktur – struktur yang didukungnya.
- 2) Lebih mudah dan tetap dibandingkan struktur yang didukungnya.
- 3) Sebagai suatu perbaikan termasuk orang – orang dan proses yang dilibatkan dan mendukung, lebih dari sekedar suatu struktur atau kelengkapan fisik.
- 4) Kadangkala berhubungan secara fisik ke struktur yang didukung.

- 5) Tersendiri dari struktur - struktur yang didukung dalam hal kepemilikannya.

Menurut para ahli yang lain, infrastruktur bersandar pada sistem fisik yang memfasilitasi transportasi, bangunan, air, dan fasilitas public lain guna diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia secara sosial dan ekonomi. (Adisasmita, 2006:20).

Dapat disimpulkan bahwa infrastruktur merupakan alat berjalannya perkembangan ekonomi pada sebuah negara, disebabkan infrastruktur ialah satu kebutuhan secara fisik untuk penjamin kesejahteraan masyarakat pada bentuk layanan kepada masyarakat baik dari segi publik maupun urusan pribadi untuk kesejahteraan masyarakat, memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan wilayah menjadi lebih baik. Jika infrastruktur tidak memadai maka akan terjadinya permasalahan dan penurunan dalam laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

2.1.6 Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan satu susunan yang terdiri dari beberapa jenis bangunan fisik yang masing - masing saling mengait dan saling berhubungan satu sama lain serta berhubungan erat dengan kemaslahatan dan kemakmuran rakyat yang telah menjadi hal utama dalam pembangunan di desa maupun sebuah daerah. Hal inilah yang amat sesuai dengan tujuan yang diinginkan daerah otonomi sendiri yang mengingatkan pelaksanaan pembangunan yang baik.

Pembangunan infrastruktur adalah suatu upaya atau rangkaian usaha pengembangan dan inovasi yang dilaksanakan dengan terencana untuk membangun prasarana maupun sebuah bangunan yang menjadi penunjang utama terlaksananya suatu proses pembangunan. (Sondang P. Siagian, 2015:37).

Infrastruktur merupakan prasarana yang dihubungkan dengan elemen yang berada dalam suatu tata ruang dan aktivitas, mempunyai peranan yang sangat penting pada penentuan kesejahteraan terhadap pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Peranan infrastruktur terhadap pertumbuhan wilayah dan kecamatan mempunyai sumbangsih amat signifikan, baik kepada aspek sosial kemasyarakatan, perekonomian, maupun pembangunan. Namun sasaran kebijakan pembangunan sistem infrastruktur yang dilakukan sekarang ini belum menunjukkan pembangunan yang memadai untuk menjalankan fungsi pendorong dan pengarah pembangunan.

2.1.7 Manfaat Pembangunan Infrastruktur

Secara umum kegunaan dari pembangunan infrastruktur ialah untuk kesejahteraan dan kkkemakmuran masyarakat telah menjadi hal utama dalam pembangunan di desa maupun di setiap daerah. Hal ini amat sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari otonomi daerah itu sendiri yang menginginkan pembangunan yang lebih baik dan sesuai dengan sasaran.

Manfaat dari pembangunan infrastruktur menurut Grig (2005:27) misalnya adalah :

1) Infrastruktur pada aspek ekonomi:

a) Pasar

Pasar ialah salah satu dari berbagai institusi, sistem, hubungan sosial dan prosedur, infrastruktur dalam menjalankan usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang - orang dengan diberikan upah uang. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian.

2) Infrastruktur pada aspek pendidikan.

a) Sekolah

Sekolah ialah organisasi kerja sebagai sarana kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan. sebagai organisasi sarana tersebut menjadi alat dan bukan tujuan. Dengan kata lain sekolah merupakan suatu bentuk hubungan kerja sama kelompok orang yang bermaksud mencapai suatu tujuan.

3) Infrastruktur pada aspek ibadah.

a) Masjid

Masjid ialah bangunan tempat ibadah umat Islam, masjid berarti tempat sujud, yang mana untuk menyempurnakan ahlak dan sikap pada diri manusia guna menjadikan kehidupan yang lebih tenram di dalam kehidupan. Masjid adalah pusat tempat sarana ibadah yang agendanya bisa juga dijadikan tempat musyawarah.

2.1.8 Kebijakan Program Nasional Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Ketentuan program nasional pembangunan infrastruktur perdesaan arah kebijakan dan strategi pembangunan wilayah pedesaan nasional dimuat dalam undang-undang No. 17 Tahun 2005 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025, dan Peraturan Presiden No. 5

Tahun 2010 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 - 2014. RPJMN 2010-2014 merupakan RPJMN tahap dua dari rangkaian RPJMN yang ditetapkan dalam RPJPN. RPJMN I dan RPJMN II ditetapkan dalam rangka pelaksanaan misi pembangunan yang sesuai dan berkeadilan. Dalam tahap ini pembangunan perdesaan meliputi :

- 1) Peningkatan agroindustri padat karya
- 2) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- 3) Peningkatan jaringan infrastruktur dalam menunjang aktivitas produksi di pedesaan dan kota - kota kecil
- 4) Pengembangan akses pemasaran, informasi, kesempatan kerja, lembaga keuangan, dan teknologi. Pengembangan kemampuan sosial budaya lokal
- 5) Kenaikan harga dan ketentuan pro pertanian.

Secara khusus, dalam Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 ditetapkan arah kebijakan pembangunan perdesaan adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat kemandirian desa dalam pemerintahan, pembangunan dan
- 2) kemasyarakatan,
- 3) Meningkatkan ketahanan desa, serta
- 4) Meningkatkan daya tarik perdesaan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan pendapatan seiring dengan upaya peningkatan kualitas SDM dan lingkungan.

Sasaran pembangunan perdesaan dalam RPJMN 2010 - 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas dan peran pemerintah desa serta kelembagaan masyarakat,
- 2) Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dan perlindungan masyarakat adat
- 3) Pengembangan ekonomi perdesaan
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana perdesaan
- 5) Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang dilatarbelakangi semangat untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan ini merupakan program lanjutan dari program pembangunan infrastruktur perdesaan sebelumnya.

Sebagai program nasional, PPIP dilaksanakan di 29 provinsi yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, dengan sasaran lokasi yang terus bertambah setiap tahunnya. Adapun PPIP meliputi komponen kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penguatan kapasitas perencanaan dan pengembangan masyarakat
- 2) Peningkatan layanan dan infrastruktur desa melalui bantuan langsung masyarakat (BLM)
- 3) Peningkatan kapasitas pelaksanaan program serta pemantauan dan evaluasi

Sedangkan pendekatan program pembangunan infrastruktur perdesaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan masyarakat, dimana seluruh proses kegiatan baik tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan melibatkan peran aktif masyarakat
- 2) Keberpihakan pada yang miskin, yaitu orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan, hasilnya diupayakan dapat berdampak langsung pada penduduk miskin
- 3) Otonomi dan disentralisasi, yaitu pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan program dan keberlanjutan infrastruktur
- 4) Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses kegiatan dan memberikan kesenpatan partisipasi aktif dari kelompok miskin, kaum perempuan, dan minoritas
- 5) Keswadayaan
- 6) Keterpaduan program pembangunan, yang berarti program dilaksanakan dengan terintegrasi dengan program pembangunan perdesaan lainnya
- 7) Penguatan kapasitas kelembagaan
- 8) Kesetaraan dan keadilan gender.

2.2 Konsep Dana Desa

2.2.1 Pengertian Dana Desa

Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: 41).

Dana Desa adalah anggaran yang dikucurkan dari desa untuk pembangunan desa. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Dari pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa Dana Desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional

2.2.2 Pemanfaatan Dana Desa

Dalam memenuhi kebutuhan dasar, maka prioritas penggunaan Dana Desa yaitu; pengembangan pos-pos kesehatan Desa dan Polindes, pengelolaan dan pembinaan posyandu, pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. Penggunaan dana desa untuk prioritas penggunaan sarana dan prasarana desa harus mendukung target pembangunan sektor unggulan, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya yang diprioritaskan. Target yang diprioritaskan yaitu mendukung kedaulatan pangan, mendukung kedaulatan energi, mendukung

pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan mendukung pariwisata dan industri. Untuk sarana dan prasarana yang didasarkan pada kondisi dan potensi desa, yang sejalan dengan pencapaian target dalam RPJMN desa dan RKP desa setiap tahunnya, yang diantaranya meliputi: dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana antara lain: pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan dan pemeliharaan embung desa, pembangunan energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.

Penggunaan dana Desa juga harus diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi.

Penggunaan dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas proses perencanaan Desa, mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya, pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat harus mampu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan desa, agar pembangunan yang dilakukan dapat dinikmati dan dimanfaatkan masyarakat desa dengan baik.

Penggunaan Dana Desa memiliki dua bidang yang diprioritas dan harus dijalankan yaitu bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, yang ke duanya ini menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang

disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa. (dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang penggunaan dana desa untuk pembangunan desa pasal 5).

1) Bidang Pembangunan Desa

Penggunaan dana Desa dalam pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Maka dari itu, penggunaan dana Desa diarahkan pada program-program seperti berikut:

- a) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman
- b) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
- c) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi
- d) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup

2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penggunaan dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan

wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain :

- a) Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan
- b) Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama, maupun oleh kelompok atau lembaga ekonomi masyarakat lainnya
- c) Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa
- d) Pengorganisasian masyarakat, fasilitas dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa
- e) Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes dan ketersediaan tenaga medis di desa
- f) Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan, pantai, dan desa
- g) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup atau bidang pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa

2.2.3 Landasan Hukum Penggunaan Dana Desa

Dasar hukum Dana Desa, meliputi:

- 1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, serta PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014
- 3) PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN, serta PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 60 tahun 2014.
- 4) Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- 5) Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 6) Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- 7) Permendes No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016.
- 8) Permendes No. 2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa.
- 9) PMK 247/PMK.07/2015 yang mengatur hal-hal teknis terkait pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta

masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan (Arifin P. Soeria Atmadja, 2009:176).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ADD tersebut diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Keuangan Desa Dan Aset Desa , Bagian Kesatu (Keuangan Desa, Pasal 71-75) dan bagian kedua (Aset Desa, Pasal 76-77)
- 2) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Infrasruktur

Pada dasarnya tujuan dari suatu Negara melaksanakan pembangunan adalah untuk mengatasi atau keluar dari masalah-masalah yang selama ini dihadapi. Dalam melakukan pembangunan antara Negara yang satu dengan Negara yang lainnya tidak mungkin akan sama. Menurut Zafar Iqbal dan Areef Suleman (2010: 17-19) ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur antara lain:

2.3.1 Kualitas Sumber Daya Manusia

Faktor yang mempengaruhi pembangunan yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia. Manusia merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam pembangunan karena manusia mempunyai peranan dalam menciptakan teknologi baru selain mengembangkan teknologi yang sudah ada, serta mengorganisasikan faktor-faktor produksi lainnya. Masalah sumber daya manusia atau dikenal dengan masalah kependudukan banyak berpengaruh kepada hasil pembangunan. Penduduk yang besar dengan luas wilayah yang besar biasa menjadi daya dukung dalam proses pembangunan. Penduduk dengan kualitas sumber daya yang tinggi akan mempercepat capaian pembangunan. Namun sebaliknya jika penduduk besar dengan kualitas yang rendah akan menjadi penghambat proses pembangunan. Sumber Daya Manusia yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik. Untuk kepentingan akselarasi suatu pembangunan dibidang apapun, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu syarat utama. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan yaitu dengan memberikan pelatihan atau *training*, memberikan *incentive* atau bonus dan mengaplikasikan atau menerapkan teknologi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.

Kualitas sumber daya manusia merupakan merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan bangsa. Jumlah penduduk yang besar, apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai,

hanyalah akan menjadi beban pembangunan. Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai. Dalam hal ketersediaan sumber daya manusia terdapat dua poin penting dalam masalah kualitas sumber daya manusia, yaitu:

1) Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena pendidikan merupakan suatu usaha untuk menguatkan kualitas manusia yang berlangsung seumur hidup dengan berpedoman pada pendidikan maka manusia akan dapat maju dan berkembang untuk mencapai kesempurnaan. Pendidikan dapat dikatakan bermutu atau berkualitas jika sudah memenuhi standar artinya produk tersebut harus tepat sesuai dengan tujuan.

Pendidikan mempunyai peran penting, karena pendidikan mampu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi modal manusia yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Seperti pada Negara-negara yang maju umumnya kualitas pendidikan yang baik sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas. Pendidikan yang baik dapat menghasilkan SDM yang baik. Jadi betapa pentingnya pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan memiliki daya saing. Kualitas pendidikan disini dapat dilihat dari seberapa tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki seseorang karena:

- a) Pendidikan yang lebih tinggi akan memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. Hal ini memungkinkan masyarakat mengambil langkah yang lebih rasional dalam bertindak atau mengambil keputusan.
 - b) Pengetahuan yang lebih baik yang diperoleh dari pendidikan menjadi perangsang untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang teknik, ekonomi dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya.
- 2) Kemampuan
- Kemampuan seseorang bisa diukur dari tingkat keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. Dengan keterampilan yang ada maka pegawai akan berusaha meningkatkan kualitas hasil kerjanya. Dalam penelitian yang peneliti lakukan maksud dari kemampuan disini yaitu kemampuan yang dimiliki oleh aparat desa serta pelaksana dari program pembangunan infrastruktur. Kemampuan yang dimiliki oleh aparat dalam bekerja dengan kelompok kerja, yakni baik dalam bekerja sama dengan sesama anggota organisasi atau instansi. Misalnya kemampuan berkomunikasi mengeluarkan ide, pendapat bahkan saran dari orang lain dapat menjadi faktor keberhasilan melaksanakan tugas yang baik. sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan lancar. Dan kemampuan dalam mengembangkan keahlian para petugas yang bersangkutan agar dapat memahami bagaimana menggunakan

pengetahuan dan keahlian baru tersebut dalam menangani kendala-kendala utama di dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

2.3.2 Sumber Daya Finansial

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Belanja dan pemiyaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember, kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2016 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Hal ini dapat kita lihat dari:

1) Tingginya biaya pendanaan

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan yaitu menemukan sumber pemiyaan pembangunan yang relative murah. Tingginya biaya pendanaan, juga muncul sebagai permasalahan dalam pembangunan. Sebagaimana dalam pelaksanaan pembangunan masih mengalami beberapa kendala diantaranya tingginya biaya pendanaan untuk pembelian bahan-bahan material. Sedangkan dana atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi sehingga mempengaruhi terhadap pelaksanaan pembangunan menjadi tidak dapat terealisasi semua.

2) Ketidaksesuaian pendanaan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur

Masalah pembangunan akan berjalan lancar dan mencapai tujuannya apabila faktor-faktor yang diperlukan untuk menunjang

pencapaian tujuan tersebut dapat dipenuhi salah satunya yaitu faktor biaya. Dimana kebutuhan akan pembiayaan atau anggaran pembangunan infrastruktur mengalami kenaikan. Untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur dapat diperoleh melalui APBN/APBD. Namun demikian, seberapa jauh anggaran yang disediakan itu sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan.

2.3.3 Tata kelola pemerintahan

Kegagalan tata kelola juga termasuk minimnya pengawasan atas peran aparat-aparat pemerintahan. Komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pengentasan rakyat miskin rendah. Hingga saat ini reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah belum berhasil memperbaiki tata kelola pemerintahan di seluruh Tanah Air. Hal ini dapat kita lihat dari:

1) Partisipasi

Partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat baik dalam perencanaan dan memberikan sumbangan-sumbangan ide terhadap proyek pembangunan yang akan dilaksanakan serta pada saat pelaksanaan itu sendiri.

Dimana dalam hal ini masyarakat berfungsi sebagai subjek sekaligus objek pembangunan yang mengetahui betul kondisi daerahnya sendiri, sehingga perkembangan yang mereka harapkan benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan.

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi

yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa dilihat dari tingkat daftar kehadiran masyarakat dalam melaksanakan gotong royong dan juga dapat kita lihat pada kegiatan rapat bulanan.

2) Transparansi dalam lembaga pemerintahan;

Transparansi yaitu terbuka, keterbukaan. Maksudnya adalah segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa, kegiatan desa, dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang.

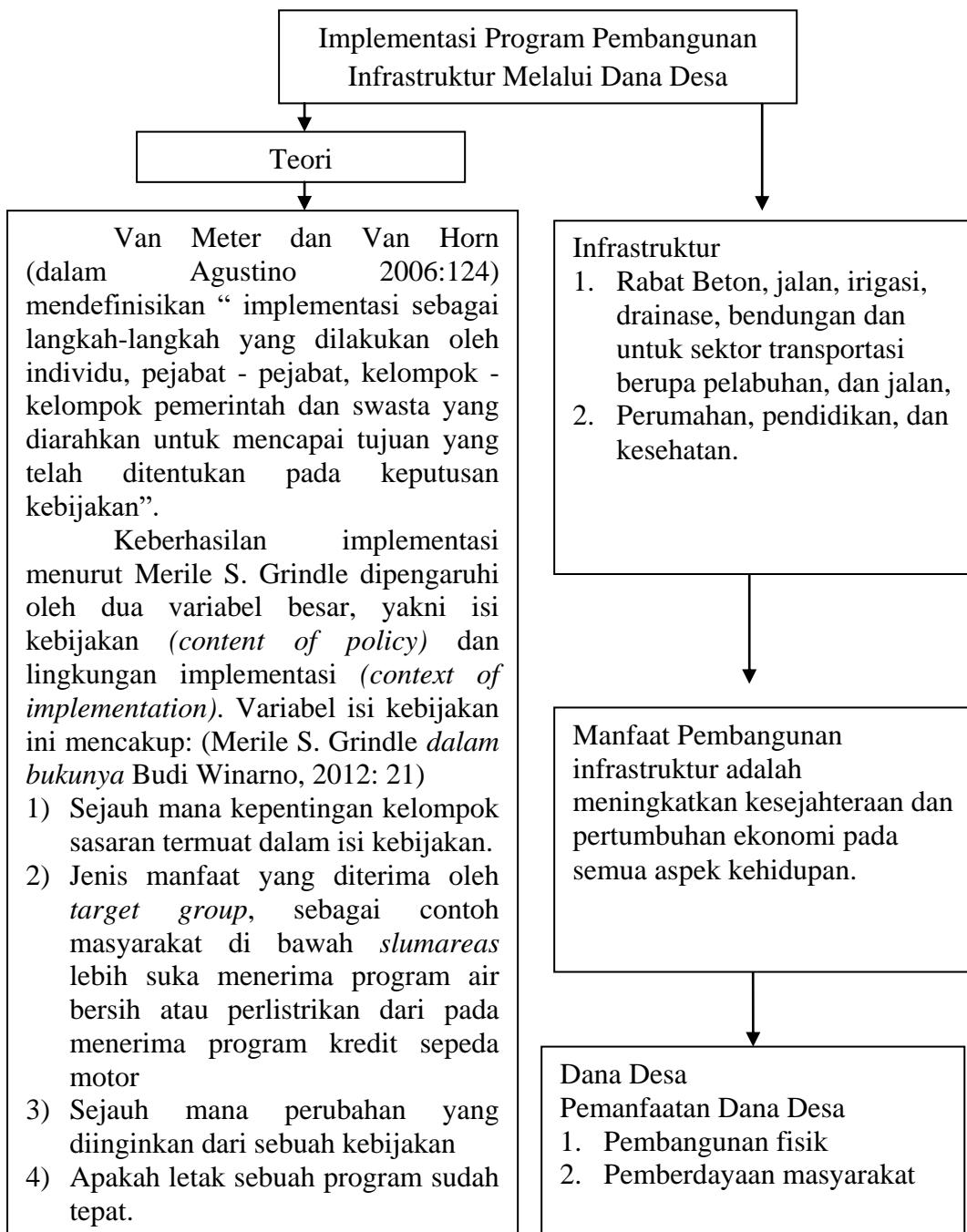
Transparansi berarti pemerintah desa pro-aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses /mendapatkan/ mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan desa beserta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa.

2.4 Kerangka Fikir

Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah implementasi program pembangunan infrastruktur. Sedangkan variabel independen adalah dana desa. Dalam penelitian ini berusaha untuk mengali informasi tentang sejauh mana pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui pemanfaatan dana desa.

Berdasarkan penjelasan variabel penelitian di atas, tinjauan landasan teori, dan penelitian dapat disusun sebuah kerangka pemikiran teoritis seperti di bawah ini:

Gambar 1.1. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu: penelitian yang dimaksud adalah mengumpulkan informasi dan membuat deskripsi tentang suatu fenomena, yaitu keadaan fenomena menurut apa adanya.

Berdasarkan teori-teori yang telah disebutkan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan secara menyeluruh dengan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran dari orang secara individu maupun kelompok, baik yang diperoleh dari data observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Beberapa deskripsi ini digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan yang berkaitan dengan implementasi program pembangunan infrastruktur melalui dana desa di Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bonebolango.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bonebolango. Peneliti memilih lokasi penelitian di seluruh wilayah Desa Bilungala karena mengingat masalah yang diteliti yaitu mengenai upaya pemerintah desa dalam membangun desa implementasi program pembangunan infrastruktur melalui dana desa di Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai

Kabupaten Bonebolango yang dilakukan oleh perangkat desa dan dilaksanakan dalam lingkup desa itu sendiri dipandang perlu untuk diteliti lebih mendalam. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Agustus 2020.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana implementasi program pembangunan infrastruktur melalui dana desa dan faktor pendukung dan penghambat implementasi program pembangunan infrastruktur melalui dana desa.

Adapun yang menjadi focus penelitian pada penelitian ini yaitu :

- 1) Pembangunan infrastruktur ekonomi, infrastruktur dalam bentuk nyata atau fisik untuk menunjang aktivitas ekonomi, *public utilities* berupa tenaga, gas, air, telekomunikasi, sanitasi dan public work berupa irigasi, jalan, drainase, bendungan serta untuk sektor transportasi berupa jalan, pelabuhan dan seterusnya.
- 2) Pembangunan infrastruktur sosial dapat berupa perumahan, kesehatan dan pendidikan.
- 3) Pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini terbagi atas dua, yaitu :

- 1) Data Primer

Data primer; yaitu data yang di peroleh dari observasi dan wawancara langsung dengan subjek dan pedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Jenis sumber ini merupakan pendukung dari sumber primer, yang mana dari sumber dari data sekunder ini diharapkan peneliti memperoleh data tambahan yang berupa dokumen tertulis, baik itu berupa jurnal, catatan lapangan, arsip administrasi, foto kegiatan peserta didik, data statistik, buku dan lainnya. Berupa tulisan seperti sejarah Bilungala Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bonebolango serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga menghasilkan data yang valid.

3.5 Informan Penelitian

Informan merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam permasalahan penelitian. Informan dipilih untuk menggali informasi tentang pembangunan infrastruktur desa serta bagaimana pemanfaatan dana desa tersebut. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan penarikan sampel secara subjektif berjumlah 13 orang terdiri dari 7 orang pemerintah desa dan 6 orang dari masyarakat yang dianggap berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekretaris Desa
- 3) Aparat Desa

4) Masyarakat

3.6 Pengumpulan Data

Dalam mengumpul data penulis menggunakan beberapa metode yang akan diuraikan sebagai berikut:

1) Observasi

Metode observasi merupakan teknik awal yang di gunakan dalam prosedur pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran umum terhadap obyek serta lokasi penelitian. Dimana observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji tingkah laku atau keadaan yang akan diteliti sambil berperan serta dalam aktivitasnya (Moleong, 2011: 135). Dalam kegiatan observasi, hal-hal yang diamati diantaranya: kegiatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan dana Desa.

2) Wawancara

Wawancara dalam peneliti ini adalah untuk melengkapi dan memperdalam hasil penelitian. Di mana metode wawancara adalah teknik dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk diperlukan dalam melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data, metode ini merupakan alat mengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, dengan melakukan wawancara peneliti dapat mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Dalam wawancara ini obyek penelitian yaitu pemerintah desa dan masyarakat di Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bonebolango.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang di gunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar (foto) dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian (Iman Gunawan 2013: 178).

3.7 Teknik Analisis data

Model analisis data di gunakan peneliti adalah model interaktif yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus.

- 1) Pengumpulan Data dalam tahap ini peneliti melakukan studi awal melalui observasi.
- 2) Penyajian data, setelah data setelah data direduksi maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah mendisplaykan data. Penyajian data yang dilakukan peneliti adalah dengan jalan membuat gambaran tentang bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui dana Desa.
- 3) Penarikan kesimpulan, dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara. Dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, kemudian mengembangkan suatu teori dari data tersebut.

Teknik yang bersifat kualitatif, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang di pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Ahmad Tanzeh, 2009:57).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1) Sejarah Berdirinya Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bonebolango

Desa Bilungala merupakan daerah transmigrasi lokal tahun 1982, angkatan transmigrasi dari berbagai desa. Kecamatan Bonepantai mengalami kepadatan penduduk sehingga membuat pemerintah kabupaten Bonebolango pada tahun 1982 mengadakan migrasi penduduk ke lokasi baru, dimana pada saat itu lokasi Desa Bilungala merupakan Hutan yang di tumbuhi oleh berbagai pepohonan.

Awal angkatan transmigrasi belum ada nama Desa, hanya sebutan hutan belantara, kemudian Pemerintah Kabupaten Bonepantai meresmikan Desa dengan nama desa Bilungala yang di setujui oleh Tokoh Agama dan Toko Masyarakat.

2) Letak Geografis Desa Bilungala

Bilungala adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango yang berada di pantai teluk tomini.

Adapun batas-batas wilayah Desa bilungala yaitu sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Suwawa
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Monano
- Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini

- Sebelah barat berbatasan dengan Kota Gorontalo

3) Visi dan Misi Desa Bilungala

a) Visi

“Terwujudnya desa Bilungala yang maju, unggul, serta terdepan berdaya saing dengan desa-desa lainnya di Kabupaten Bone Bolango dan berada pada tingkat peradaban sesuai norma hukum, adat istiadat, dan agama”.

b) Misi

- Mewujudkan masyarakat sejahtera dan berkualitas
- Mewujudkan tata pemerintahan yang berkeadilan dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat
- Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat
- Pembangunan infrastruktur
- Mewujudkan masyarakat yang sadar serta taat kepada nilai-nilai agama, adat istiadat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Data Normatif Aparat Desa Bilungala

Dalam urusan pemerintahan desa, jumlah personil organisasi di desa harus memadai untuk menjalankan roda pemerintahan desa dan untuk menunjang pembangunan di desa sesuai dengan tujuan dan sasaran dari program pembangunan desa. Berikut tabel 1.1 daftar nominatif aparat desa bilungala yaitu:

Tabel 1.1 Daftar Nominatif Aparat Desa Bilungala Tahun 2021

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	JABATAN
1	Abd. Azis Bumulo	Laki-Laki	SLTA	KADES
2	Ismail, Shi	Laki-Laki	S.1	SEKDES
3	Yowan Lauhi, S.Sos	Perempuan	S.1	Kaur Perencanaan
4	Herawati Hadju	Laki-Laki	SLTA	Kaur Keuangan
5	Agusalim Mooduto	Laki-Laki	S.1	Kasie Pemerintahan
6	Abdul Azis Husain, S.Kom	Laki-Laki	S.1	Kasie Kesra & Pelayanan
7	Fadli Adam	Laki-Laki	SLTA	Staf Kantor Desa
8	Jefri Saleh	Laki-Laki	SLTA	Kadus Poluluwa
9	Agus Lakude	Laki-Laki	SLTA	Kadus Buhuta
10	Ramlan Harun	Perempuan	SLTA	Kadus Iloheluma
11	Siswanto Kiayi	Laki-Laki	SLTA	Kadus Taruna
12	Lilispratiwi Mantulangi	Perempuan	D.III	Kadus Luwo Pantai
13	Sumarton Wahaya	Laki-Laki	SLTA	Kadus Luwo Dalam
14	Alvian S. Mooduto	Laki-Laki	SLTA	Kadus Luwo Atas

Sumber Data : Laporan Bulanan Desa Bilungala Tahun 2021

Dari tabel 1.1 di atas, jumlah personil pemerintah desa Bilungala berjumlah 14 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kasie Pemerintahan, Kasie Kesra Dan Pelayanan, Staf Kantor Desa, Kepala Dusun Poluluwa, Kadus Buhuta, Kadus Taruna, Kadus Luwo Pantai, Kadus Luwo Dalam, dan Kadus Luwo Atas.

5) Keadaan Penduduk Desa Bilungala

Penduduk di Desa Bilungala didominasi oleh laki-laki dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Berikut keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Bilungala

Tahun 2021

JENIS KELAMIN	JUMLAH L/P		JUMLAH TOTAL
	L	P	
Laki-Laki	960		960
Perempuan		914	914
			1.874

Sumber Data : Laporan Bulanan Desa Bilungala Tahun 2021

Dari tabel 1.2 di atas, keadaan penduduk di desa Bilungala lebih di dominasi oleh penduduk dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 960 jiwa dibandingkan dengan penduduk yang berjenis kelamin perempuan dengan jumlah jiwa 914 orang.

Tabel 1.3 Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2021

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH L/P		JUMLAH
		L	P	
1	0-14	203	184	387
2	15-55	603	585	1188
3	> 56	154	145	299
TOTAL JUMLAH		960	305	1.874

Sumber Data : Laporan Bulanan Desa Bilungala Tahun 2021

Data pada tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa dari segi kategori usia, penduduk usia produktif lebih besar dari usia tidak produktif.

6) Data Sarana dan Prasarana Desa Bilungala

Sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah Desa Bilungala dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Bilungala Tahun 2021

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	VOLUME	SATUAN	SUMBER DANA
1	Lapangan Olah Raga	1	Unit	APBDES
2	Rabat Beton	-	-	
3	Jalan desa	300	Meter	APBDES
4	Jalan Poros	157	Meter	APBDES
5	Jaringan Perpipaan	1	Ls	APBD II
6	Kantor Desa	1	Unit	APBN
7	Sekolah	2	Unit	APBN

Sumber Data : Laporan Bulanan Desa Bilungala Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1.4 di atas diketahui desa Bilungala memiliki 1 unit lapangan olah raga, jalan desa sepanjang 300 meter, jalan poros sepanjang 157 meter, jaringan perpipaan 1 Ls, memiliki kantor desa 1 unit dan sarana pendidikan berjumlah 2 unit.

4.1.2 Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Melalui Dana Desa Di Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bonebolango

1) Pembangunan Infrastruktur Bidang Ekonomi

Pembangunan infrastruktur bidang ekonomi sangat menunjang kegiatan pasar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya bagi masyarakat yang menjual hasil kebunnya di pasar lokal maupun di luar daerah.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, pembangunan infrastruktur melalui dana desa di Desa Bilungala belum terlaksana secara optimal, hanya ada beberapa pembangunan yang terlaksana pembangunannya seperti jalan desa, jalan poros, sanitasi, sudah terlaksana. Sedangkan pembangunan drainase, dan rabat beton, belum terlaksana pembangunannya. Hal tersebut dapat dikatakan belum efektif dan efisien pembangunan desa karena belum terlaksana secara menyeluruh pada program prioritas, padahal sudah di anggarkan melalui dana desa prioritas pembangunan infrastruktur tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa Bilungala yang menyatakan:

Infrastruktur dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat yang sudah terlaksana pembangunannya yaitu jalan desa, sanitasi, dan jalan poros. Sedangkan untuk drainase dan rabat beton belum terlaksana sesuai dengan program pemerintah desa melalui pemanfaatan dana desa. (Abd. Azis Bumulo. *Wawancara*, 19 Maret 2021).

Dari hasil wawancara dengan kepala desa peneliti tentang pembangunan infrastruktur dilokasi penelitian belum optimal ditandai dengan belum terlaksananya pembangunan drainase dan rabat beton. Sehingga peneliti menyimpulkan belum optimalnya pembangunan infrastruktur dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat dalam mengairi masing-masing kebunnya untuk menghasilkan hasil kebun yang baik dan dijual ke pasar lokal maupun ke luar daerah.

Ismail selaku sekretaris desa bilungala menambahkan bahwa pembangunan jalan desa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dibantu oleh sebagian masyarakat yaitu sepanjang 300 meter. Sedangkan jalan poros sepanjang 157 meter dimana telah menjadi jalan penyambung antara jalan desa menuju jalan

persawahan masyarakat. Pembangunan sanitasi di lakukan melalui penjaringan perpipaan pada setiap saluran air yang ada di desa. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat dalam kegiatan perkebunan dan pertanian. (Ismail, *Wawancara*, 19 Maret 2021).

Dari hasil wawancara dengan Ismail di atas menandakan pembangunan infrastruktur jalan desa, jalan poros, dan jaringan perpipaan merupakan bentuk kepedulian pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun desa untuk kepentingan bersama. Hal ini ditandai dengan kekompokan antar pemerintah desa dengan sebagian masyarakat dalam bahu membahu, bergotong royong untuk bersama-sama membangun infrastruktur desa.

Ditambahkan pula oleh Yowan Lauhi selaku kaur perencanaan yang menyatakan:

Pembangunan jalan desa dan jalan poros serta sanitasi sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran penggunaan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat yang menjadi misi dari pada pemerintah desa Bilungala. Perencanaan pembangunan yang telah dimuat dalam anggaran desa yaitu ada enam program pembangunan, tetapi tiga program seperti pembangunan rabat beton, poskesdes, dan drainase belum terlaksana. (Yowan Lauhi, *Wawancara*, 19 Maret 2021).

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di desa Bilungala belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan perencanaan awal oleh pemerintah desa dan masyarakat melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Bilungala.

Prioritas utama dari program pembangunan infrastruktur di desa yaitu pembangunan jalan desa dan poros yang tersambung dengan jalan perkebunan warga serta pembangunan jaringan perpipaan ke saluran air di desa. Hal ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui

penyediaan anggaran untuk membiayai pembangunan tersebut. Jalan desa dan jalan poros sangat dibutuhkan untuk akses transportasi masyarakat dalam bertani, bercocok tanam, serta menjual hasil perkebunan ke daerah lain. Sedangkan jaringan perpipaan dibutuhkan untuk menjaga kesehatan lingkungan agar tetap sehat dan bersih dari segala penyakit. (Herawati Hadju, *Wawancara*, 19 Maret 2021).

Infrastruktur jalan bukan hal sosial masyarakat yang merupakan tempat bertumpuh dalam perkembangan ekonomi, namun tanpa ketersediaan infrastruktur jalan dan pembangunan sarana prasarana yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi akan sulit dicapai. Hal ini melatarbelakangi kebutuhan jalan dan jaringan perpipaan sebagai prioritas pembangunan.

Berbeda dengan yang dikatakan oleh Agusalim Mooduto yang menyatakan:

Prioritas program pembangunan infrastruktur di desa tidak hanya pada peningkatkan infrastruktur jalan dan sanitasi lingkungan saja, melainkan kebutuhan pembangunan fisik lainnya, seperti drainase, sarana kesehatan (poskesdes), dan rabat beton yang sebenarnya merupakan program prioritas dari desa Bilungala yang belum terlaksana pada tahun 2020 lalu. Untuk tahun 2021 telah direncanakan dan diprogramkan ditindak lanjuti untuk dilaksanakan sebagai pembangunan fisik pendukung ekonomi masyarakat. (Agusalim Mooduto, *Wawancara* 19 Maret 2021).

Memiliki infrastruktur yang lengkap dan kemudahan dalam akses, menjadi daya tarik besar untuk kegiatan pertanian, perkebunan, nelayan, karena mayoritas penduduk sebagai petani dan nelayan. Infrastruktur jalan juga berdampak baik bagi pedagang di pasar desa, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Jefri Saleh mengatakan “pembangunan fisik di desa belum cukup memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, karena belum adanya drainase yang baik untuk mengatur aliran air di persawahan warga. Sering terjadi genangan air di persawahan warga ketika hujan lebat. Hal ini mengakibatkan bibit padi yang sudah di tanam mengalami genangan air yang bisa membuat bibit tersebut tidak tumbuh”. (Jefri Saleh, *Wawancara*, 20 Maret 2021).

Pernyataan informan tersebut dikuatkan dengan kondisi desa saat curah hujan yang tinggi disertai kiriman air dari desa-desa lain sering mengakibatkan genangan air pada persawahan warga, sehingga perlu adanya saluran aliran untuk menanggulangi genangan air tersebut. Hal ini yang menjadikan pembangunan drainase menjadi sangat penting bagi lahan resapan lingkungan, sekaligus air dapat dialirkan langsung ke sungai besar.

Arah kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan dengan menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi, termasuk kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal dalam kondisi ini yaitu pertanian sebagai potensi yang diutamakan. Hal ini dapat mendorong usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak dapat diperbarui kepada Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat diperbarui menuju masyarakat yang berkualitas, maju dan mandiri dalam keanekaragaman masyarakat dan kegiatannya.

Abdul Azis Husain mengatakan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan berdampak buruk bagi desa seperti rendahnya kualitas hidup,

kesulitan dalam pemberantasan kemiskinan serta menurunkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing desa dengan desa lainnya.

Ditambahkan oleh Mohamad Fadila Kamaru menyatakan:

Pembangunan fisik di desa masih kurang, karena belum terlaksana pembangunan rabat beton di desa yang telah menjadi program prioritas pembangunan desa melalui kesepakatan pemerintah desa dan masyarakat pada musyawarah desa melalui usulan masyarakat dan telah dianggarkan melalui dana desa. (Mohamad Fadila Kamaru, *Wawancara* tanggal 20 Maret 2021).

Pemerataan pembangunan dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan program pembangunan sehingga manfaat pembangunan lebih mudah tercapai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata.

Tujuan dan sasaran penggunaan dana desa yaitu untuk mensejahterakan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam mengatasi kondisi kemiskinan masyarakat dan mempermudah akses kegiatan perdagangan masyarakat di pasar desa maupun kota. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah desa melalui pembangunan jalan desa dan jalan poros serta sanitasi lingkungan. (Abd Azis Bumulo. *Wawancara*, 20 Maret 2021).

Pembangunan infrastruktur sebagai upaya berkesinambungan dalam meningkatkan daya saing serta mempercepat pemerataan pembangunan yang terencana dan sistematis dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa melalui pemanfaatan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel sehingga terwujudlah peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Ditambahkan pula oleh Ismail yang menyatakan:

Pemanfaat dana desa sangat dibutuhkan dalam perberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dana desa diharapkan dapat membantu dan mengatasi kemiskinan dilingkungan masyarakat secara efektif dan efisien. (Ismail, *Wawancara*, 20 Maret 2021).

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas program pemerintah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Upaya pembangunan yang terencana dan sistematis pada sektor yang diprioritaskan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efektif dan efisien dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Yowan Lauhi mengatakan pembangunan fisik dan non fisik telah direncanakan pada musrembangdes dengan dianggarkan pada dana desa. Salah satu sasaran pemanfaatan dana desa yakni memberdayakan masyarakat dengan menyediakan semua sarana prasarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat secara berkala dan terarah menurut peraturan perundang-undangan berlaku. (YowanLauhi, *Wawancara*, tanggal 21 Maret 2021).

Pembangunan di desa dilatarbelakangi oleh kemanfaatan yang berorientasi pada kelancaran pasar di desa untuk kegiatan jual beli hasil nelayan di laut dan hasil pertanian masyarakat sebagai bentuk perkembangan dan pertumbuhan ekonomi warga.

Abdul Azis Bumulo mengatakan kegiatan pembangunan prioritas desa yang diajukan dalam pelaksanaannya mengacu pada petunjuk teknis penggunaan dana desa. Program pembangunan yang akan dilaksanakan diumumkan oleh Kepala Desa, untuk mendorong masyarakat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.

Penggunaan dana desa harus berdasarkan petunjuk teknis pemanfaatan dana desa agar penggunaannya terarah dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan Ismail, pembangunan jalan desa dan jalan poros sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran penggunaan dana desa yang telah direncanakan melalui musyawarah desa. Pembangunan memperhatikan cuaca dan kontur tanah agar pembangunan berjalan lancar tanpa ada hambatan. (Ismail, *Wawancara*, tanggal 21 maret 2021).

Untuk mengecek kebenaran dari apa yang dikatakan oleh pemerintah desa di atas, peneliti mewawancarai beberapa masyarakat, berikut hasil wawancaranya.

Mohamad Idris mengatakan pembangunan yang terlaksana di desa yaitu pembangunan jalan desa, jalan poros, dan sanitasi lingkungan. Pembangunan lainnya belum terlaksana. Namun pemerintah desa telah mengupayakan pembangunan infrastruktur lainnya akan dilaksanakan pada tahun ini melalui penerimaan dana desa tahap ke tiga sesuai dengan perencanaan awal oleh pemerintah dan masyarakat. (Mohamad Idris, *Wawancara* tanggal 23 Maret 2021).

Ditambahkan pula oleh Saleh Ibrahim yang menyatakan:

Pembangunan fisik yang telah dilaksanakan dan sudah terlaksana di desa Bilungala yaitu pembangunan jalan desa dan jalan poros yang menghubungkan jalan menuju perkebunan masyarakat terutama di kebun yang saya garap. Dengan adanya pembangunan jalan ini sangat memudahkan para petani seperti saya untuk mengarap dan menuai hasil perkebunan. Hal ini sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa Bilungala. (Saleh Ibrahim, *Wawancara* tanggal 23 Maret 2021).

Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Muhammin Bumulo yang mengatakan pertumbuhan pembangunan di desa belum sepenuhnya terlaksana disebabkan belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat terutama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan buruh kasar, fasilitas yang dimiliki belum memadai terutama untuk rabat beton dipesisir pantai belum ada pembangunan dilaksanakan, padahal rabat beton sangat dibutuhkan untuk menjadi penghalang arus gelombang air laut ketika terjadi air pasang yang mengakibatkan gelombang

tinggi sehingga air laut tersebut sampai ke rumah-rumah warga yang berada di pesisir pantai. Selain itu juga, tempat sandaran perahu para nelayan agak sulit didapatkan karena dasar darat ketika menjelang malam semakin ke atas pemukiman warga. (Muhammin Bumulo, *Wawancara* tanggal 27 Maret 2021).

Pembangunan infrastruktur di desa sangat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam menunjang segala aktifitas mata pencaharian masyarakat baik masyarakat yang berprofesi sebagai petani, nelayan, buruh kasar maupun karyawan swasta untuk melaksanakan pekerjaan mereka masing-masing.

Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan pembangunan fisik di desa Bilungala dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahap penerimaan dana desa, pembangunan yang dilaksanakan pada penerimaan dana desa tahap satu yaitu pembangunan jalan desa, jalan poros dan sanitasi lingkungan yang berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat. Sedangkan pembangunan drainase dan rabat beton belum terlaksana dan telah direncanakan pada penerimaan dana desa tahap ketiga.

2) Pembangunan Infrastruktur Bidang Sosial

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, pembangunan infrastruktur sosial di Desa Bilungala berupa puskesmas, poskesdes, sarana ibadah dan pendidikan belum terlaksana secara maksimal. Hal ini ditandai dengan tidak adanya puskesmas dan poskesdes di desa Bilungala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa Bilungala yang menyatakan:

Pembangunan puskesmas dan poskedes di desa belum tersentuh bahkan belum termuat dalam rencana pembangunan desa pada tahun ini disebabkan keterbatasan anggaran yang ada. Sarana pendidikan sudah tersedia untuk Sekolah Dasar (SD) yang dibangun bersumber dari dana

APBN. Sedangkan sarana ibadah terdapat satu unit bangunan masjid yang dibangun dengan dana bantuan pemerintah daerah dan bantuan secara sukarela dari masyarakat. (Abd. Azis Bumulo. *Wawancara*, 27 Maret 2021).

Ketersediaan anggaran sangat mendukung terlaksananya pembangunan di desa, baik pembangunan fisik dan pembangunan non fisik lainnya. Selain itu juga peran aktif antara pemerintah dan masyarakat untuk saling bekerja sama dalam mewujudkan desa yang maju dan mandiri dalam segala aspek pertumbuhan. Kemajuan desa sangat ditentukan oleh sarana dan prasarana yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sarana kesehatan desa seperti puskesmas dan poskesdes belum ada pembangunannya khusunya di desa Bilungala, hanya terdapat satu unit Sekolah Dasar serta satu unit mesjid sebagai sarana pendidikan dan sarana ibadah masyarakat. Hal ini sangat memprihatinkan karena ketika masyarakat sangat membutuhkan pertolongan untuk pengobatan bagi masyarakat yang sakit, warga harus menempuh jarak yang cukup jauh ke puskesmas kecamatan bonepantai untuk mendapatkan pengobatan. Oleh karena itulah pemerintah desa akan berupaya untuk membangun poskesdes di desa Bilungala apabila tersedianya anggaran pembangunan. (Herawati Hadju, *Wawancara*, 27 Maret 2021).

Hal-hal yang melatarbelakangi pembangunan berorientasi kemanfaatan bagi masyarakat dan prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional melalui pemerataan pembangunan yang dimulai dari lingkup desa. Perencanaan pembangunan yang ditetapkan merupakan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi desa.

Pembangunan infrastruktur sosial masyarakat belum tersentuh dengan dana desa, pembangunan direncanakan akan dilaksanakan dan dianggarkan pada dana desa tahun 2022. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kekurangan anggaran yang diterima serta mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah daerah dalam membangun fasilitas sosial terutama poskesdes untuk mengantisipasi masalah jarak tempuh masyarakat berobat ke puskesmas. (Ismail, *Wawancara*, 30 Maret 2021).

Ketersediaan anggaran yang dimiliki desa sangat menunjang terlaksananya pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan pembangunannya secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah dicita-citakan bersama baik pemerintah maupun masyarakat.

Untuk mengecek kebenaran dari apa yang dikatakan oleh pemerintah desa di atas, peneliti mewawancarai beberapa masyarakat sebagai berikut:

Roman Pakaya menyatakan:

Pembangunan sarana kesehatan di desa Bilungala belum terlaksana untuk tahun ini, berdasarkan hasil musyawarah desa pemerintah desa bersama masyarakat telah disepakati pembangunannya akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan Alokasi Dana Desa tahap pertama tahun anggaran 2022. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kecukupan anggaran dana desa tahun 2021. (Roman Pakaya, *Wawancara*, 30 Maret 2021).

Ditambahkan pula oleh Novarianto Mooduto yang menyatakan :

Sarana pendidikan di desa Bilungala terdapat satu unit Sekolah Dasar (SD) dan sarana ibadah terdapat satu unit mesjid, pembangunannya bersumber dari dana APBN. Selain itu, pos kesehatan desa atau POSKESDES belum ada khususnya di desa Bilungala, tetapi pemerintah telah berusaha untuk dilakukan pembangunannya pada tahun 2022 dengan Alokasi Dana Desa tahap pertama. (Novarianto Mooduto, *Wawancara*, 30 Maret 2021).

Dari hasil penelitian di atas, bisa di tarik kesimpulan pembangunan sarana sosial melalui dana desa belum terlaksana. Hal itu ditandai dengan tidak adanya bangunan poskesdes dan kurangnya sarana ibadah serta sarana pendidikan yang dimiliki. Pemerintah desa bersama masyarakat melalui musyawarah desa telah merencanakan pembangunannya akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan Alokasi Dana Desa tahap pertama.

4.1.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Melalui Dana Desa Di Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bonebolango

1) Faktor Pendukung

Implementasi program pembangunan infrastruktur dengan dana desa dilaksanakan menurut tahapan-tahapan pelaksanaan yang telah ditentukan oleh pemerintah desa. Pembangunan infrastruktur sangat didukung oleh tersedianya anggaran yang cukup memadai untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan di desa. Pembangunan di desa Bilungala sangat didukung oleh alokasi dana desa yang sesuai dengan anggaran belanja desa. Selain itu juga, pelaksanaan pembangunan sangat didukung oleh partisipasi masyarakat serta peran aktif aparat desa untuk menjadikan pembangunan yang efektif dan sesuai dengan sasaran penggunaan dana desa. Sebagaimana yang dikatakan oleh sekertaris desa sebagai berikut.

Pembangunan desa sangat didukung oleh ketersediaan anggaran desa untuk pembiayaan belanja desa, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta peran serta oleh aparat desa pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa. Hal inilah yang menjadi pendukung terlaksananya pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran pemanfaatan dana desa. (Ismail, *Wawancara*, 02 Mei 2021).

Pembangunan infrastruktur desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dengan peningkatan sarana prasarana yang mendukung produktifitas masyarakat maupun dari segi bantuan usaha bagi masyarakat. Akan tetapi program pembangunan infrastruktur desa masih belum maksimal. Untuk memaksimalkan program pembangunan infrastruktur ini, perlu diketahui faktor pendukung agar dapat dijadikan bahan evaluasi pemerintah desa.

Partisipasi masyarakat dalam ikut serta pelaksanaan pembangunan di desa sangat dibutuhkan untuk membantu dan ikut mengawasi proses jalannya pembangunan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam musyawarah desa dan disepakati oleh pemerintah desa dan masyarakat. (Abd. Azis Bumulo. *Wawancara*, 02 Mei 2021).

Program pembangunan infrastruktur desa difokuskan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri sejalan dengan kebijakan program pembangunan desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Proses pelaksanaan pembangunan di desa memiliki dasar yang jelas sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat di desa Bilungala. Pembangunan yang terarah akan menghasilkan hasil yang baik dan maksimal, oleh karena itu sasaran pembangunan harus jelas arah dan tujuannya agar tercapainya pembangunan yang efektif, efisien, dan maksimal. (Herawati Hadju, *Wawancara*, 02 Mei 2021).

Abdul Azis Husain menyatakan:

Profesionalisme kinerja aparat desa sangat mendukung tercapainya pembangunan yang maksimal sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu aparat desa wajib mengembangkan keahliannya masing-masing dalam bidang pekerjaanya. Karena ketika aparat desa ,llbekerja tidak sesuai dengan keahliannya akan menghambat terlaksananya pembangunan di desa. (Abdul Azis Husain, *Wawancara*, 02 Mei 2021).

Ditambahkan pula oleh Agusalim Mooduto yang menyatakan:

Program implementasi pembangunan infrastruktur ini mendapat respon yang baik dari petugas pelaksana maupun masyarakat. Hal ini terlihat dari kesadaran masyarakat akan pentingnya program pembangunan di desa sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan dikalangan masyarakat itu sendiri. (Agusalim Mooduto, *Wawancara*, 02 Mei 2021).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu poin penting dalam perencanaan pembangunan Desa. Hal ini juga yang telah dilaksanakan Pemerintah. Sebelum memutuskan daftar rencana kegiatan untuk pembangunan Desa, terlebih dahulu Pemerintah Desa mengajak masyarakat desa turut langsung memberikan aspirasi untuk kemajuan desa.

Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dan profesionalitas kinerja aparat desa merupakan faktor pendukung dalam program pelaksanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan tujuan dan sasaran pemanfaatan dana desa.

2) Faktor Penghambat

Dari hasil penelitian peneliti di Desa Bilungala, yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dengan dana desa yakni anggaran yang tidak mencukupi dalam membiayai pelaksanaan program pembangunan desa. Selain itu juga, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pertumbuhan pembangunan desa yang menjadi penghambat dalam perkembangan

pembangunan infrastruktur desa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa sebagai berikut.

Pembangunan infrastruktur di desa Bilungala masih mengalami beberapa hambatan terutama kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan fisik di desa dalam membangun sanitasi lingkungan bersih, pembangunan jalan desa dan jalan poros. Selain itu juga kecukupan anggaran yang dimiliki oleh desa sehingga pembiayaan pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur tidak tersedia. Hal inilah yang menyebabkan terkendalanya pelaksanaan program pembangunan di desa Bilungala. (Abd. Azis Bumulo. *Wawancara*, 03 Mei 2021).

Partisipasi masyarakat dan ketersediaan anggaran pembangunan merupakan faktor penting dalam menentukan arah pembangunan yang baik dan maksimal. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat serta dana yang mencukupi dalam pembiayaan pelaksanaan program pembangunan agar terlaksana dengan efektif dan efisien.

Menurut Yowan Lauhi faktor penghambat utama dalam pembangunan infrastruktur yakni ketersediaan anggaran yang dimiliki. Di desa Bilungala pelaksanaan program pembangunan infrastruktur mengalami kendala diantaranya tidakmencukupinya anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu sangat dibutuhkan bantuan dan kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. (Yowan Lauhi, *Wawancara*, 03 Mei 2021).

Ditambahkan pula oleh Ismail yang menyatakan:

Untuk mencapai pembangunan yang maksimal dibutuhkan kerja sama pemerintah dengan masyarakat. Di desa Bilungala belum tercipta kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dalam pelaksanaan pembangunan mengalami kendala dalam hal tenaga kerja yang seharusnya dipergunakan tenaga kerja masyarakat di Desa Bilungala itu sendiri sebagai tukang berbagai keahlian masing-masing masyarakat. (Ismail, *Wawancara*, 03 Mei 2021).

Bendahara Desa juga menambahkan apa yang dikatakan oleh Sekertaris Desa di atas yang menyatakan:

Profesionalisme aparat desa juga sangat dibutuhkan dalam mengelola keuangan desa. Di Desa Bilungala dalam pelaporan dana desa selalu mengalami keterlambatan dalam pelaporan disebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan dalam pembukuan SPJ sehingga dalam penyaluran Dana Desa mengalami kendala yang mengakibatkan tertundanya penyaluran dana. Hal ini sangat mempengaruhi pembangunan di Desa Bilungala menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pembangunan di desa. (Herawati Hadju, *Wawancara*, 03 Mei 2021).

Profesionalisme kinerja aparat desa sangat berperan penting dalam roda perekonomian desa. Roda perekonomian berdampak langsung terhadap perkembangan pembangunan desa. Seperti yang disampaikan langsung oleh Kepala Desa Bilungala, rata-rata perangkat desa yang bekerja di desa memiliki kualitas pendidikan yang rendah. Sehingga dalam melakukan pengelolaan dana desa, perangkat desa sangat bergantung kepada pendampingan desa. (Abd. Azis Bumulo. *Wawancara*, 03 Mei 2021).

Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di desa Bilungala yakni kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa, ketersediaan anggaran yang tidak memadai untuk pembiayaan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, dan rendahnya profesionalitas aparat desa dalam bekerja.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Melalui Dana Desa Di Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bonebolango

1) Pembangunan Infrastruktur Bidang Ekonomi

Pembangunan infrastruktur dalam menunjang ekonomi masyarakat telah direncanakan dalam musyawarah desa yang diikuti oleh segenap masyarakat, aparat desa, lembaga desa, BPD, dan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mencapai pembangunan yang terarah sesuai dengan tujuan dan sasaran pemanfaatan dana desa.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat yakni pembangunan jalan desa dan jalan poros. Pembangunan jalan ini dilakukan untuk membuka akses transportasi masyarakat dalam bekerja dan menjual hasil perkebunan dan perikanan mereka ke pasar. Hal inilah yang mendorong pemerintah dalam membangun jalan tersebut. Selain itu juga, pemerintah telah membangun sanitasi lingkungan desa untuk menjadikan lingkungan yang bersih dari kotoran yang mengakibatkan berbagai penyakit bagi masyarakat. Rencana dari komunikasi pembangunan jalan desa Bilungala yaitu mengundang para tokoh masyarakat, dimana kegiatan pembangunan infrastruktur dilakukan di balai-balai desa setempat hingga terjadinya kesepakatan bersama mengenai komunikasi pembangunan jalan.

Pemerintah desa bersama dengan masyarakat telah melaksanakan pembangunan tersebut walaupun tidak semua masyarakat yang ikut andil dalam

pembangunan tersebut. Hanya beberapa masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan di desa Bilungala. Pembangunan dilaksanakan berdasarkan program pembangunan di desa Bilungala yang menjadi prioritas pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa. Hal ini dilakukan demi terwujudnya tujuan pembangunan yang terarah, transparan, akuntabel, dan mensejahterakan masyarakat.

2) Pembangunan Infrastruktur Bidang Sosial

Pemerintah desa Bilungala telah merencanakan pembangunan infrastruktur sosial bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga desa lainnya. Namun dalam pelaksanaan pembangunannya belum terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat dikarenakan kurangnya anggaran yang tersedia dalam pembangunan infrastruktur sosial terutama saranakesehatan atau POSKESDES. Sarana sosial lainnya seperti sekolah dan sarana ibah sudah tersedia dengan sumber dana pembangunannya dari APBD dan bantuan masyarakat secara sukarela.

Pembangunan sarana kesehatan masyarakat untuk dipergunakan dalam berobat bagi masyarakat yang sedang sakit direncanakan akan dilaksanakan pembangunan pada penerimaan dana desa tahap pertamatahun anggaran 2022. halini dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir kekurangan anggaran pada tahap sebelumnya sehingga diperlukan adanya perencanakan yang tepat sesuai dengan ketersediaan anggaran desa.

4.2.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Melalui Dana Desa Di Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bonebolango

1) Faktor Pendukung

Partisipasi masyarakat merupakan masalah yang penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di desa. Adanya keikutsertaan masyarakat dalam perkembangan dan pertumbuhan pembangunan desa merupakan kontrol masyarakat dalam mengawasi perkembangan pembangunan di desa. Selain itu juga, tersediannya anggaran pembangunan sangat menentukan berlangsungnya pembangunan infrastruktur desa, tanpa dana desa tidak akan sanggup untuk membangun infrastruktur yang sangat memerlukan biaya yang sangat besar.

Peran aktif aparat desa dalam pembangunan sangat diperlukan juga selain partisipasi masyarakat dan kecukupan anggaran dalam pembangunan, karena aparat desa merupakan pengelola keuangan desa yang utama bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perkembangan dan pertumbuhan pembangunan desa. Di Desa Bilungala aparat desa sangat antusias dalam pembangunan desa.

2) Faktor Penghambat

Terlaksananya pembangunan di desa sangat ditentukan oleh kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat. Di Desa Bilungala pembangunan infrastruktur mengalami kendala diantaranya kurangnya kepedulian masyarakat dalam pembangunan desa untuk andil dan ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Selain itu juga rendahnya profesionalitas kerja aparat desa dalam bekerja dan melakukan pengelolaan dana desa yang menyebabkan terhambatnya penyaluran dana desa yang menjadi kendala dalam pembangunan desa serta

Ketersediaan anggaran desa dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur juga yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan. Di Desa Bilungala kurangnya anggaran yang tersedia menyebabkan tidakterlaksananya pembangunan fisik di desa. Dana desa yang tersedia masih kurang mencukupi untuk membiayai segala belanja desa terutama dalam pembelanjaan bahan dan alat untuk membangun infrastruktur desa. Hal inilah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Bilungala.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Pembangunan infrastruktur di Desa Bilungala dilaksanakan dengan dua bidang pembangunan yaitu; a) pembangunan infrastruktur bidang ekonomi, pembangunan infrastruktur ekonomi ini diantaranya jalan desa, jalan poros, dan sanitasi lingkungan. Pembangunan infrastruktur ini tujuan dan sasarannya untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat, b) pembangunan infrastruktur bidang sosial di Desa Bilungala belum terlaksana dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia. Pembangunan infrastruktur ini direncanakan pembangunan pos kesehatan desa atau sering disebut dengan POSKESDES. Sedangkan pembangunan pendidikan dan sarana ibadah sudah terlaksana dengan sumber dana APBN dan dari bantuan masyarakat secara sukarela.
- 2) Faktor pendukung dan penghambat implementasi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur melalui dana desa yaitu; a) faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yakni tersediannya anggaran untuk pembangunan, partisipasi masyarakat, dan peran aktif dalam pembangunan desa, b) faktor penghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur yakni kurang kepedulian masyarakat terhadap

- 3) pembangunan di desa, kurang dana yang dimiliki desa dalam pemberian pembangunan, dan rendahnya profesionalitas kerja aparatur desa.

5.2 Saran

- 1) Pemerintah desa harus menjalin kerja sama yang baik dengan masyarakat dalam melakukan pembangunan untuk kemajuan desa dan meningkatkan profesionalitas kinerja aparatur desa dengan melaksanakan studi banding tentang pengelolaan dana desa.
- 2) Masyarakat diharapkan menumbuhkan sikap kepedulian terhadap pertumbuhan dan perkembangan pembangunan desa untuk ikut serta dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah di sepakati bersama dengan pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Edisi ke3*, Balai. Pustaka: Jakarta.
- Grigg. 2005. *Rekayasa dan Manajemen Infrastruktur*. John Wiley and Sons.
- Gunawan Iman, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kuncoro Mudrajad, 2010. *Dasar-dasar Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Maleong J. Lexy. 2011 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Mudasir. 2012. *Desain Pembelajaran*, Indragiri Hulu : STAI Nurul Fatah.
- Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tentang Desa. Jakarta. 2005.
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Infrastruktur
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.
- Prastowo Andi. 2010. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Prasetyo, Rindang Bangun dan Firdaus Muhammad, 2009. *Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Rahardjo Adisasmita. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- S. Grindle Merile. 2012. (Dalam Buku Budi Winarno). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Siagian Sondang. 2015. *Kiat Meningkatkan Produktivitas*. Rineka Cipta Karya.

- Soeria Atmadja P. Arifin, 2009. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sondang P. Siagian. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suti'ah Muhaimin dan Sugeng Listyo Prabowo, 2009. *MANajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Syamsi Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri. 2006. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Syaodih Ernady. 2015. *Manajemen Pembangunan*, Bandung : Refika Aditama.
- Tanzeh Ahmad, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras.
- Wresniwirowo. 2012. *Membangun Republik Desa*. Jakarta: Visimedia
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah, Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik*, UNDIP: Semarang.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pemanfaatan dana desa di Desa Bilungala ?
2. Apa saja yang menjadi tujuan dan sasaran pemanfaatan dana desa ?
3. Bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui penggunaan Dana Desa ?
4. Apa saja yang menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur melalui dana desa di Desa Bilungala?
5. Bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang ekonomi ekonomi di Desa Bilungala?
6. Pembangunan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah ?
7. Bagaimana pembangunan jalan, irigasi dan drainase di Desa Bilungala ?
8. Apakah terlaksana sesuai dengan yang telah di targetkan ?
9. Bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur sosial diDesa Bilungala?
10. Pembangunan apa saja yang telah dilakukan ?
11. Bagaimana pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan di Desa Bilungala?
12. Apakah terlaksana sesuai dengan yang telah di targetkan ?
13. Bagaimana hubungan/keterlibatan, pemerintah, masyarakat, dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut ?
14. Apakah tercipta kerja samaantara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui dana desa di Desa Bilungala ?
15. Apa saja faktor pendukung pembangunan infrastruktur melalui dana desa di Desa Bilungala ?
16. Apa saja faktor penghambat dari pembangunan infrastruktur melalui dana desa di Desa Bilungala ?

Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. Wawancara bersama Kepala Desa, Bpk Abd.Azis Bumulo



Gambar 2. Wawancara bersama Sekertaris Desa, Bpk Ismail S.Hi



Gambar 3. Wawancara bersama Kaur Perencanaan, Ibu Yowan Lauhi S.Sos



Gambar 4. Wawancara Bersama Kaur Keuangan Ibu, Herawati Hadju



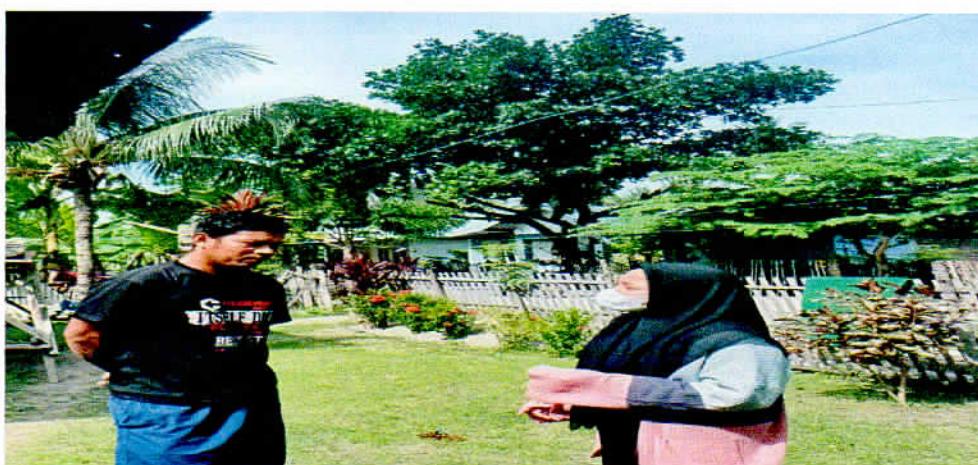
Gambar 5. Wawancara Bersama Kasie Pemerintahan dan Kaur Perencanaan Bpk,Agusalim Mooduto dan Ibu, Yowan Lauhi S.Sos



Gambar 6. Wawancara Bersama Narasumber Masyarakat Bpk, Mohamad Fadilah Kamaru



Gambar 7. Wawancara Bersama Narasumber Masyarakat Bpk, Mohamad Idris



Gambar 8. Wawancara Bersama Narasumber Masyarakat Bpk, Saleh Ibrahim

ABSTRACT

KINTAN NURAINI HADIA. S2117016. IMPLEMENTATION OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROGRAM THROUGH VILLAGE FUND IN BILUNGALA VILLAGE, BONE PANTAI SUBDISTRICT, BONEBOLANGO DISTRICT

This study aims at finding out 1) the implementation of infrastructure development programs through village funds in Bilungala Village, Bone Pantai Subdistrict, Bonebolango District, and 2) the supporting and inhibiting factors for implementing infrastructure development programs through village funds in Bilungala Village, Bone Pantai Subdistrict, Bonebolango District. This study employs a qualitative method with data collection through observation, interviews, and documentation. The data analysis technique applies data collection, data presentation, and conclusions. The results of this study indicate that: 1) the development of infrastructure programs in Bilungala Village is carried out in two areas of development, namely: (a) infrastructure development in the economic sector, which includes village roads, pivotal roads, and environmental sanitation. The objectives and targets of this infrastructure development are to support the community's activities in the economy, and (b) the social sector infrastructure development in Bilungala Village has not been implemented due to the limited available budget. 2) the supporting factors in the infrastructure development implementation are the availability of a budget for development, community participation, and an active role in village development. Meanwhile, the inhibiting factors are the lack of public awareness of development in the village, the lack of funds owned by the village in financing development, and the low professionalism of the work of village officials.

Keywords: government efforts, community participation, village development



ABSTRAK

KINTAN NURAINI HADIA. S2117016. IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI DANA DESA DI DESA BILUNGALA KECAMATAN BONE PANTAI KABUPATEN BONEBOLANGO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) implementasi program pembangunan infrastruktur melalui dana desa di Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bonebolango, dan 2) faktor pendukung dan penghambat implementasi program pembangunan infrastruktur melalui dana desa di Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bonebolango. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pembangunan program infrastruktur di Desa Bilungala dilaksanakan dengan dua bidang pembangunan, yaitu: a) pembangunan infrastruktur bidang ekonomi, pembangunan infrastruktur ekonomi ini di antaranya berupa jalan desa, jalan poros, dan sanitasi lingkungan. Tujuan dan sasaran dari pembangunan infrastruktur ini adalah untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat, dan b) pembangunan infrastruktur bidang sosial di Desa Bilungala belum terlaksana yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia, dan 2) faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah tersedianya anggaran untuk pembangunan, partisipasi masyarakat, dan peran aktif dalam pembangunan desa sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan di desa, kurang dana yang dimiliki desa dalam pembangunan, dan rendahnya profesionalitas kerja aparatur desa.

Kata kunci: upaya pemerintah, partisipasi masyarakat, pembangunan desa





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3054/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Bilungala

di,-

Tempat

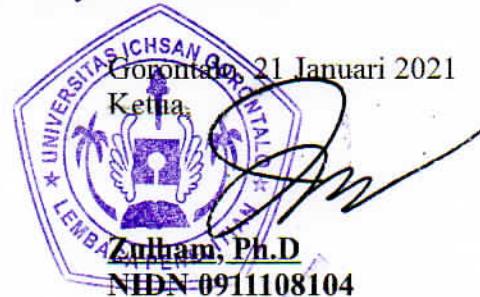
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Kintan Nuraini Hadia
NIM : S2117016
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : DESA BILUNGALA KECAMATAN BONEPANTAI KABUPATEN BONEBOLANGO
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI DANA DESA DI DESA BILUNGALA KECAMATAN BONEPANTAI KABUPATEN BONEBOLANGO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



**PEMERINTAH DESA BILUNGALA
KECAMATAN BONEPANTAI
KABUPATEN BONE BOLANGO**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 174/DS.05/VI-2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo :

Nama : **KINTAN NURAINI HADIA**

NIM : S2117016

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 19 Maret S/d 3 Mei di Kantor Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango untuk menyusun Skripsi dengan judul **Implentasi Program Pembangunan Infrastruktur Melalui Dana Desa di Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021.**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0776/UNISAN-G/S-BP/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : KINTAN NURAINI HADIA
NIM : S2117016
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI DANA DESA DI DESA BILUNGALA KECAMATAN BONEPANTAI KABUPATEN BONEBOLANGO

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 31%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 09 September 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_KINTAN NURAINI HADIA_S2117016_IMPLEMENTASI PROGRAM.docx

Sep 9, 2021

9832 words / 66861 characters

S2117016 KINTAN NURAINI HADIA

SKRIPSI_KINTAN NURAINI HADIA_S2117016_IMPLEMENTASI P...

Sources Overview

31%

OVERALL SIMILARITY

1	www.scribd.com	8%
2	ejurnal.unisan.ac.id	3%
3	repository.unwira.ac.id	2%
4	repository.uir.ac.id	2%
5	rumahmakalah.blogspot.com	2%
6	eprints.umpo.ac.id	1%
7	repository.uin-suska.ac.id	1%
8	repositori.unsil.ac.id	1%
9	etheses.uin-malang.ac.id	1%
10	repository.uma.ac.id	1%
11	repository.ub.ac.id	<1%
12	repo.iain-tulungagung.ac.id	<1%
13	eprint.stiwww.ac.id	<1%
14	docplayer.info	<1%
15	fr.scribd.com	<1%
16	ecampus.iainbatusangkar.ac.id	<1%

17	es.scribd.com	<1%
18	INTERNET	
19	repository.uinsu.ac.id	<1%
20	INTERNET	
21	pegiringan.desa.id	<1%
22	INTERNET	
23	repository.usu.ac.id	<1%
24	INTERNET	
25	core.ac.uk	<1%
26	pai.iaingorontalo.ac.id	<1%
27	jiap.ub.ac.id	<1%
28	INTERNET	
29	eprints.uny.ac.id	<1%
30	INTERNET	
31	deni-daud.blogspot.com	<1%
32	INTERNET	
33	media.neliti.com	<1%
34	INTERNET	
35	digilib.uinsgd.ac.id	<1%
36	INTERNET	
37	repository.usu.ac.id	<1%
38	INTERNET	

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None

RIWAYAT HIDUP MAHASISWA

Nama : Kintan Nuraini Hadia

Nim : S2117016

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 1 Januari 2000

Agama : Islam

Alamat : Desa Bilungala

No. Telpon : 082291907677

Fakultas : Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP)

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan : S1(Strata Satu)

Judul Skripsi : Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Melalui Dana Desa Di

Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango

